

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tatanan pendidikan yang mandiri, dan berkualitas, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan berbagai upaya strategis dan integral yang menunjang penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat menghasilkan SDM yang bermutu.

Pemerintah tentunya perlu merancang satu desain pendidikan yang mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Salah satu komponen penting dari sistem dan desain pendidikan tersebut adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara. Kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat secara sentralistik, dan diberlakukan bagi seluruh anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia.

Kurikulum Menurut Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka (19) bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum juga sering dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan bangsa itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan sekarang. Nilai sosial, kebutuhan dan tuntutan masyarakat selalu mengalami perubahan antara lain akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum harus dapat mengantisipasi perubahan tersebut, sebab pendidikan adalah cara yang dianggap paling strategis untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Kurikulum 2006, yang juga disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan salah satu kurikulum setelah era otonomi daerah. Kurikulum 2006 merupakan kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi –KBK) yang disempurnakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP) Yang merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang SPN). Oleh karena itu, kurikulum 2004 merupakan embrio dari kurikulum 2006. Kurikulum 2006 (KTSP) yang juga berbasis kompetensi (dalam Widayastono, 2014:88).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan

karakteristik peserta didik. Sekolah dan komite sekolah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di SD, SMP, SMA, dan SMK, serta Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK (dalam Widyastono, 2014:89).

Pengembangan KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Setelah dijalankan lebih dari tujuh tahun akhirnya pemerintah sepakat untuk mengubah kurikulum 2006 (KTSP), dengan kurikulum 2013. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa kurikulum 2013 merupakan implementasi dari RPJMN 2010-2014. Kebijakan Kurikulum 2013 merupakan usaha pemantapan pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional, yang salah satu kebijakannya berbunyi untuk penyempurnaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pembelajaran. Dalam naskah RPJMN juga tersurat bahwa sasaran

penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan menengah adalah 25% sekolah sudah menerapkan kebijakan penyempurnaan kurikulum sebelum tahun 2012 dan 100% sekolah pada 2014 (Yani, 2014:2).

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang sarat dengan pendidikan karakter. Dalam perubahan kurikulum 2013 tersebut ditandai dengan penggunaan istilah baru dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yaitu istilah Kompetensi Inti atau KI. Lahirnya KI diawali dari pengelompokan kompetensi pokok atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Awalnya, kompetensi sikap hanya ada satu rumusan saja, namun setelah ada pendalaman materi maka arti sikap dibedakan antara sikap spiritual dan sikap sosial (Yani, 2014:54).

Isi dari sikap spiritual dan sikap sosial berasal dari butir-butir pendidikan karakter yang telah disosialisasikan sejak 2010. Salah satu redaksi KI-2 misalnya berbunyi *“menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”*. (Yani, 2014:55) Muatan aspek sikap di atas mengandung nilai tentang pendidikan karakter. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 sangat sarat dengan muatan pendidikan karakter.

Dari setiap pembaharuan kurikulum yang dilakukan biasanya dimulai dari perubahan konseptual yang fundamental yang diikuti oleh perubahan struktural. Pembaharuan dikatakan bersifat sebagian bila hanya terjadi pada komponen tertentu saja, Pembaharuan kurikulum bersifat menyeluruh bila mencakup perubahan semua komponen kurikulum.

Tetapi terkadang perubahan kurikulum yang setiap waktu dilakukan tidak melihat kesiapan penyelenggara; khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Sehingga banyak pertanyaan yang timbul, baik dari kesiapan mereka dalam menjalankan kurikulum yang sedang diterapkan? Pemahaman mereka tentang kurikulum yang di terapkan oleh pusat? Serta bagaimana mereka mengembangkan kemampuan kreativitasnya untuk menjabarkan kurikulum dan melaksanakannya dalam pembelajaran, ditambah lagi dengan kekurangan sarana dan prasarana ataupun media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan mendasar yang harus diperhatikan dalam setiap pembaruan kurikulum.

Seperti yang terjadi belakangan ini tentang penerapan kurikulum 2013 yang menimbulkan pro dan kontra, Karena dianggap belum digarap dengan matang namun sudah terburu – buru dilaksanakan. Akibatnya, ketika guru sebagai instrumen utama pendidikan juga belum siap menggunakan kurikulum 2013, imbasnya beban belajar jadi berpindah ke siswa. Sehingga pemerintah mengambil upaya dan memutuskan untuk menerapkan kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), bagi sekolah yang baru menerapkan kurikulum 2013 selama satu smester. Menteri Pendidikan lewat

staf kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemdikbud) telah menerbitkan sebuah Permendikbud yang baru, Permendikbud No. 61 tahun 2014 tentang Kurikulum KTSP pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Permendikbud tersebut adalah merupakan permendikbud penegas dari kembalinya kurikulum KTSP untuk digunakan kembali sebagai pengganti kurikulum 2013 (<http://Pagar.Alam.Com>).

Pro dan kontra tentang penerapan kurikulum 2013 hampir menjadi perdebatan di setiap sekolah, begitupun di sekolah SMP Negeri 3 Kwandang yang kembali menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Yang tentunya setiap guru memiliki pandangan masing – masing tentang kebijakan yang kembali dibuat. Ini yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Persepsi Guru SMP Negeri 3 Kwandang Tentang Pemberhentian Penerapan Kurikulum 2013 Dan Penerapan Kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana persepsi guru tentang pemberhentian penerapan kurikulum 2013 dan penerapan kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)?

1.3. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah penerapan kurikulum 2013 dan penerapan KTSP.

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi guru tentang pemberhentian penerapan kurikulum 2013 dan penerapan kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi:

1. Praktisi

Sebagai bahan masukan bagi Dunia Pendidikan dalam hal ini pemerintah atau Kementerian Pendidikan untuk mengembangkan kurikulum.

2. Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pengembangan pendidikan mengenai kurikulum.

3. Peneliti

Sebagai bahan referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang kebetulan juga tertarik untuk meneliti mengenai kurikulum. Dan juga sebagai bahan pembandingan antara teori dengan realita yang terjadi di lapangan.